

## **JURNAL HUKUM**

### **PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI SEKOLAH GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Geraldine Anggun Ardiantina**

**NPM : 130511212**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JURNAL HUKUM**  
**PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA KELUARGA**  
**PRA SEJAHTERA DI SEKOLAH GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Geraldine Anggun Ardiantina

NPM : 130511212

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kesejahteraan Sosial

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 12 Mei 2017

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

# PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI SEKOLAH GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA

Geraldine Anggun Ardiantina

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta  
geraldineardiantina@gmail.com

## ABSTRACT

*This thesis is about the fulfillment of children's right of education in underprivileged families of Gajah Wong School in Yogyakarta. This thesis aim is to know about how to determine the fulfillment of children's right to get education of children from underprivileged families. This research is a normative legal one, where the data were collected by literature study and interview. The result of this thesis shows that the government had to protect and fulfill the right of education for all sections of society without exception. For recommendation, the government should increase efforts to fulfill the right of education in terms of budget and physical facilities for all levels without exception.*

**Keyword :** *education, children education rights, underprivileged family*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan haluan negara yang merupakan transformasi dari nilai Pancasila. Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut maka, Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat fungsi negara yang dimasukkan ke dalam alinea keempat. *Founding Fathers* secara konsisten mengupayakan kesinambungan antara empat pokok pikiran dengan empat fungsi negara.<sup>1</sup>

*Founding Fathers* bangsa ini mempunyai cita-cita yang mulia. Cita-cita mulia tersebut berkaitan dengan instrument sebagai *nation and*

*character building*.<sup>2</sup> Keinginan Bung Karno tersebut, dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita negara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sangat penting untuk menjadi salah satu dari beberapa tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Negara tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan, UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengatur mengenai masalah pendidikan :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

<sup>1</sup>[nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan.Kehidupan.Bangsa](http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan.Kehidupan.Bangsa). (Diakses: Senin, 13 September 2016) pkl. 00.34 WIB.

<sup>2</sup>Nalle Williamson, Victor Immanuel. 2011. *Mengembalikan Tanggungjawab Negara Dalam Pendidikan : Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas dan UU BHP*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 4, Agustus 2011, hlm. 551.

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Merujuk Pasal 31 ayat (1) pasca amandemen, bermakna negara harus menjamin bahwa setiap negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu berarti bahwa setiap rakyat Indonesia tidak boleh sampai kesulitan mengakses pendidikan dengan alasan tidak mampu mengakses pendidikan. Untuk menjamin tiap-tiap warganegara mendapatkan pendidikan, UUD juga mewajibkan Pemerintah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang ( Pasal 31 ayat (2)).<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berisi pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang dalam hal memperoleh pengembangan, peningkatan dan kemajuan dari berbagai bidang. Hak atas pendidikan tersebut tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai ujung tombak bangsa. Pendidikan dan anak merupakan hal yang saling berkaitan sebagai indikator memajukan kualitas suatu bangsa.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggungjawab untuk menjaminnya.<sup>5</sup> Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Hak tersebut belum terpenuhi dengan salah satunya alasan yaitu karena tidak mampu secara ekonomi (pra sejahtera). Hal tersebut

---

<sup>3</sup>Sumarsono, S, 2001, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.17.

---

<sup>4</sup>Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2008. Dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Diakses: Senin, 13 September 2016).

<sup>5</sup>dokumen.tips/documents/pemenuhan-hak-atas-pendidikan-bnhdvn.html. (Diakses: Rabu, 21 September 2016) pukul 12.49 WIB.

sangat kontras dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Pasal 3 ayat (3) sub a bahwa tugas pemerintah menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 25 sub a, b dan i bahwa tanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan

lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>8</sup> Angka ini naik dari tahun ke tahun, hal tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor kekurangan tenaga pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah. Angka putus sekolah di Indonesia tergolong tinggi.

Ketimpangan untuk mengakses pendidikan tersebut sejalan dengan situasi banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat beberapa orang yang berkumpul di dalam Komunitas Tabah (Advokasi Arus Bawah) yang peduli terhadap pendidikan anak-anak, terutama terhadap pendidikan anak pemulung dan pengamen di daerah Timoho. Sekolah Gajah Wong dirintis pada tahun 2011 atas kepedulian terhadap nasib para anak-anak pemulung yang tidak mengalami perubahan. Komunitas Tabah (Advokasi Arus Bawah) yang selama ini melakukan pendampingan masyarakat di Ledok Timoho mengusulkan untuk membuat sekolah usia dini. Mereka berpendapat untuk

---

<sup>6</sup>Endang, Sumiarni dan Chandra, Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). (diakses: Rabu, 20 Oktober 2016) pukul 15.10 WIB.

---

<sup>8</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah-> (Diakses : Jumat, 10 September 2016) pkl. 13.45 WIB.

memperbaiki nasib, anak-anak pemulung harus mendapat pendidikan yang baik.<sup>9</sup>

## 2. METODE

### Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak keluarga pra sejahtera di sekolah gajah wong Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah/ Pengurus Sekolah Gajah Wong

dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

### Analisis Data

#### a. Bahan hukum primer

1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong.

2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu sama lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-gajahwong-semangat-memutus-rantai-kemiskinan-anak-pemulung.html>. (Diakses : Jumat, 10 September 2016) pkl. 13.45 WIB.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama lain. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).

4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan bagi anak keluarga pra sejahtera

serta nilai keadilan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang atau atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang Pemenuhan hak atas pendidikan pada anak keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan

pada keluarga pra sejahtera di sekolah gajah wong kota Yogyakarta.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Profil Sekolah Gajah Wong**

Sekolah Gajah Wong dibangun sebagai semangat advokasi dan fasilitasi menuju kemandirian masyarakat miskin kota. Sekolah ini merupakan sekolah gratis bagi anak usia dini dan dasar, bagi kalangan kaum miskin kota di wilayah Yogyakarta.

Sekolah Gajah Wong merupakan Lembaga Pendidikan anak usia dini dan pendidikan kejar paket ABC. Lembaga Pendidikan ini adalah kelompok bermain yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar dan pembentukan perilaku melalui pembiasaan anak di usia pra sekolah dan memberikan pendidikan dasar yang tidak dibatasi oleh usia.

Sekolah Gajah Wong berada di bantaran sungai Gajah Wong tepatnya di Kampung Komunitas Ledhok Timoho Rt 50/05 Balerejo, Mujaumu Yogyakarta (Belakang Perumahan APMD/ Pinggir Kali Gajah Wong). Sekolah ini menempati sebidang tanah berukuran kurang lebih 12x6 meter dengan menempati dua kelas

yaitu kelas akar dan rumput. Pembagian kelas tersebut bedasarkan pada usia dan tingkat perkembangan anak didik. Sementara ini baru memfasilitasi 35 orang anak usia dini dan 20 anak usia dasar. Memiliki 4 ( empat) guru dan dibantu 6 (enam) orang relawan. Sumber pembiayaan operasional sekolah yang telah berdiri selama 7 tahun ini berasal dari usaha kolektif yaitu peternakan kambing, sahabat anak, donasi sampah, pengembangan pelayanan anak seperti Gajah Wong Hijau, Gajah Wong T-shirt, donator tidak tetap maupun tetap, dan hibah, wakap, zakat dan shadaqah.

Pembelajaran dalam proses belajar-mengajar sekolah ini menggunakan metode tematik, proyek, trip, area (*art craft*, lukis, sains, persiapan calistung (baca,tulis, berhitung), main peran computer dan balok), *celebration*, *environment* dan 3R (*Reduce, reuse, recycle*). Kurikulum yang disusun oleh Sekolah Gajah Wong yaitu mengangkat keberagaman, kearifan lokal, cita lingkungan hidup, dan berbasis alam serta lingkungan masyarakat sekitar sebagai media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang disusun. Secara prinsip sekolah ini memberikan edukasi untuk anak dan orangtua.



Memiliki enam program pendidikan, yaitu kegiatan pembelajaran kelas bagi anak PAUD, TK dan Sekolah Dasar, sekolah keliling, parenting, pendidikan tentang anak, *life skill* dan kesehatan reproduksi orangtua, perpustakaan, posyandu dan peningkatan gizi serta kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan dan advokasi perlindungan anak. Waktu pelaksanaan pendidikan anak usia dini adalah pada pagi hari pukul 08.00 sampai dengan 10.00 dan pendidikan kejar paket ABC menyesuaikan waktu luang peserta didik.

Sejarah didirikannya Sekolah Gajah Wong berawal dari semangat dari teman-teman yang beraktifitas di jalan demi memperjuangkan hak hidup ( identitas diri, kehidupan yng layak, keseatan dan pendidikan). Dari 18 kelompok atau komunitas jalanan yang ada di Yogyakarta membentuk satu wadah aspirasi bagi teman-teman yang ada di jalanan dengan nama Gerakan Kaum Jalanan Merdeka (GKJM) di tahun 2000 disepakatilah nama TAABAH ( Team Advokasi Arus Bawah) yang memiliki visi “Bersama Kaum Miskin Kota Mebangun dan Berjuang Menuju Kesejahteraan dan Kehidupan yang Bermartabat.” TAABAH didirikan pada tanggal

7 Mei 2002 dan mendapat izin operasional ORSOS dari Dinas Sosial DIY : Nomor : 188/1653/V.I tanggal 21 April 2011. Dalam perkembangannya TAABAH mampu membangun sekolah gratis dengan nama Sekolah Gajah Wong yang didirikan pada pertengahan di antara bulan Januari dan Februari tahun 2009 dan kemudian diresmikan oleh GKR Pembayun pada 24 Januari 2013. Pada awalnya bermotto “Sekolah untuk rakyat miskin”, tetapi seiring berjalannya waktu berganti menjadi “Sekolah untuk semua”, hal tersebut berarti bahwa sekolah ini tidak hanya diperuntukkan untuk rakyat miskin saja, tetapi anak siapapun dapat bersekolah disini.

## **b. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas**

### **Pendidikan di Sekolah Gajah Wong**

Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hasil penelitian terhadap usia peserta didik di Sekolah Gajah Wong bahwa peserta didik

Sekolah Gajah Wong masih sesuai dengan kategori anak. Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) dalam Pasal 48 bahwa, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pendidikan Dasar sembilan tahun berarti pendidikan mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan rentang usia 7 sampai dengan 15 tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu di usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sementara dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bahwa negara peserta akan menyelenggarakan pendidikan dasar dan secara gratis bagi semua anak, anak yang dimaksud adalah merujuk dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berisi pengertian pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian pendidikan tersebut sesuai dengan pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Gajah Wong, hal tersebut diketahui dengan tujuan didirikannya Sekolah Gajah Wong yaitu untuk memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan sebagai bekal di masa depan. Selain itu proses belajar dan mengajar di Sekolah Gajah Wong berpusat terhadap anak supaya anak terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya guna menyerap ilmu pengetahuan sebagai ketrampilan yang diperlukan di masa depan.

Indonesia telah mempunyai konstitusi yang lengkap mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal khusus yang mengatur mengenai hak atas pendidikan yaitu pada Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) seharusnya menjadi dasar pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu peraturan dengan baik. Kenyataannya pembuat undang-undang tidak konsisten mengatur soal penyelenggaraan pendidikan. Tanggungjawab negara dalam membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa wewenang pemerintah di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun wewenang. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, inti dari kedua peraturan pelaksanaan tersebut yaitu bahwa kewenangan di bidang pendidikan berada di kabupaten/kota.

Efektifitas hukum Hak Asasi Manusia (HAM) terutama di bidang pendidikan adalah suatu pemenuhan kewajiban negara untuk mengakui, mengatur, menghormati, memajukan dan melindungi standar-standar internasional pemenuhan dan perlindungan HAM di seluruh sendi-sendi penyelenggaraan negara. Efektifitas dapat diukur dari dua indikator yaitu pembentukan dan pelaksanaan instrument hukum dan kelembagaan HAM baik di bidang eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang memiliki akses terhadap pendidikan

tanpa ada diskriminasi<sup>10</sup>, serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislative dan dalam bidang lainnya.<sup>11</sup> Transformasi efektif nilai-nilai HAM di bidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara senyatanya<sup>12</sup> untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terutama di bidang pendidikan di Indonesia.

Prinsip Limburg memperingatkan bahwa negara berkemungkinan melakukan pelanggaran apabila:<sup>13</sup>

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya.
2. Negara gagal menghilangkan rintangan dengan cepat dimana negara tersebut wajib untuk menghilangkannya.
3. Negara gagal melaksanakan suatu hak yang wajib pemenuhannya dengan segera tanpa penundaan lagi.
4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional.
5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui oleh Kovenan.
6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak.

---

<sup>10</sup> Convention Against Discrimination in Education 1960, dalam Geraldine van Bueren, 1998, *International Document on Children*, (2<sup>nd</sup>, eds), hlm. 317-322.

<sup>11</sup> Novak, *loc.cit.*, No.16, hlm 196.

<sup>12</sup> Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, *The Right to Education (Art.13)*, 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESR, 8 Desember 1999, para 1.

<sup>13</sup> Prinsip Limburg dalam *UN Center for Human Rights* dan Komnas HAM, Lembar Fakta ( *Fact Sheet*), Naskah Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, hlm.218.

7. Negara gagal memberikan laporan yang diwajibkan oleh Kovenan.

Kegagalan negara dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam Kovenan Hak Ekosob. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati maupun melaksanakan, negara juga dapat dikenai telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan *perlindungan*, negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran hak anak atas pendidikan. Di samping itu, mengenai kewajiban untuk *melaksanakan*, negara diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut. Kegagalan negara untuk

memberikan hak tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup>

Pemenuhan pada sisi kewajiban hasil meliputi beberapa aspek sesuai dengan turunan dari penjelasan hak Ekosob (Ekonomi, sosial, budaya) di bidang pendidikan yang erat kaitannya dengan kondisi atau keadaan yang sedang berjalan. Namun dalam penelitian ini lebih berfokus kepada aspek yang menunjukkan kaitan kuat dengan ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), dan kualitas (*quality*).

Dari segi ketersediaan (*availability*), negara telah berupaya untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari bangunan sekolah, ruang kelas hingga berbagai fasilitas pelengkap lain seperti perpustakaan dan laboratorium. Tujuannya jelas supaya warga negara pada usia sekolah bisa sekolah dan mendapatkan pelayanan pendidikan.

---

<sup>14</sup> Ibrahim R, 2009, *Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional (Permasalahan Teori dan Praktek)*, hlm. 18.

Pada kenyataannya berbeda dengan yang dikeluhkan oleh pengajar Sekolah Gajah Wong Ika Aulia Anggi Tartila S.Pd, beliau menyatakan bahwa bangunan Sekolah Gajah Wong telah mengalami kerusakan. Pada saat hujan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung beberapa anak didik dan pengejar terkenan tetapan air hujan dikarenakan atap kelas yang bocor. Selain itu pada saat kegiatan olahraga tidak dapat dilaksanakan di ruang yang disediakan dikarenakan terkena banjir luapan air dari sungai Gajah Wong.

Negara bisa saja mengatakan bahwa telah memberikan banyak sekali kemudahan untuk mendukung dalam dunia pendidikan, bangunan sekolah memang telah banyak dibangun oleh pemerintah, tetapi belum mencapai daerah pinggiran ataupun tempat terpencil. Kenyataannya berbeda, pemerintah terkesan tidak serius untuk membantu dalam pemajuan di bidang pendidikan terutama dalam hal pembangunan bangunan sekolah.

Indikator penting lain yang terkait dengan ketersediaan pemenuhan hak atas pendidikan adalah tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia. Data yang ada tidak menunjukkan Indonesia yang cerdas dan berpendidikan tinggi, tetapi sebaliknya menggambarkan Indonesia yang kurang pendidikan yang justru mengarah pada terbelakang.

Rerata pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Ledhok Timoho, sebagian besar hanya tamatan SD (54 orang). Bahkan sekitar 45 warga yang tidak menyenangi pendidikan (akumulasi dari 27 warga yang tidak tahu pendidikannya, 14 orang belum sekolah, dan 1 orang tidak pernah sama sekali bersekolah). Hal ini berarti dengan pesatnya kemajuan zaman yang mengandalkan teknologi yang tinggi masih banyak masyarakat yang belum dapat membaca maupun menulis. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah

ketersediaan masih menjadi tantangan yang sulit untuk dipecahkan.

Indikator yang selanjutnya adalah keterjangkauan (*accessability*). Ada banyak hal yang dapat mengukur keterjangkauan, yaitu diskriminasi, jarak dan keterjangkauan biaya. Dalam penelitian ini yang lebih disorot adalah masalah keterjangkauan dari segi biaya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Mengenai “siapa” yang membiayai pendidikan tersebut, dialihkan dari kewajiban utama pemerintah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pengalihan tanggungjawab pendidikan dari pemerintah pada masyarakat ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 32 ayat (2) ditentukan

pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara yang bersangkutan. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 51 ayat (3) yang intinya pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat berasal dari masyarakat dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Pada Pasal 32 ayat (4) yang intinya bahwa Pemerintah, Pemda, pemangku kepentingan dan pihak asing dapat membantu pendanaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kata membantu menceminkan tanggungjawab pemerintah yang tidak sungguh-sungguh sepenuhnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 53 ayat (1) menegaskan, pemerintah memiliki tanggungjawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari

keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Drs. Bakhtiar Nurhidayat, selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan mengatakan bahwa kasus mengenai siswa dari keluarga tidak mampu yang mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi, sepenuhnya tidak ada. Kenyataannya Sekolah Gajah Wong tidak mendapatkan bantuan maupun akses program pemerintah dalam bidang pendidikan dengan alasan terkendala aspek legalitas sekolah ini. Sekolah Gajah Wong membiayai operasional sekolahnya dengan usaha kolektif dari Donasi Bank Sampah untuk anak, Koperasi, Peternakan kambing dan sumbangan serta donasi dari masyarakat maupun kontribusi peneliti yang meneliti Sekolah Gajah Wong.

Masalah keterjangkauan harga disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi orangtua untuk membiayai anaknya bersekolah. Terlepas dari bantuan BOS yang memungkinkan menggratiskan SPP

(Sumbangan Pembiayaan Pendidikan), Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan oleh Pemerintah yang ada di banyak sekolah namun kenyataannya tidak mampu menutupi biaya operasional sekolah dan biaya personal (baju seragam, sepatu, buku tulis, biaya makan/jajan dan biaya transportasi) sepenuhnya menjadi tanggungan orangtua.

Sisi terakhir yaitu kualitas (*quality*), menjadi tantangan yang besar bagi pendidikan di negara Indonesia. Berbagai ukuran untuk menilai kinerja pendidikan kita, namun tetap menunjukkan gambaran yang kurang baik. Pendidikan masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Di Sekolah Gajah Wong sebagian besar pengajarnya tamatan S1 (Sarjana Strata Satu), namun rata-rata lulusannya bukan sarjana pendidikan, tetapi sarjana agama islam dan sarjana sejarah. Walaupun begitu terdapat 1 orang pengajar yang lulusan sarjana pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara persyaratan



administratif tidak diperbolehkan untuk mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1) bahwa pemerintah melakukan sertifikasi terhadap para guru. Sertifikasi yang dimaksudkan adalah untuk menguji kelayakan seseorang terhadap profesi tertentu dalam hal ini yang diuji kelayakannya adalah profesi guru. Tidak ada satupun pengajar di Sekolah Gajah Wong yang telah tersertifikasi sebagai guru.

Selain guru bagian lain yang menyumbang kualitas adalah fasilitas pendidikan. Mengenai fasilitas lengkap, laboratorium bahasa, perpustakaan siswa lengkap dan berkualitas tidak dapat ditemukan di Sekolah Gajah Wong. Ruang kelas yang tidak memadai, laboratorium maupun perpustakaan tidak dapat dipenuhi oleh pihak sekolah dikarenakan oleh biaya, pihak sekolah takut dengan diadakannya fasilitas tersebut menambah beban orangtua

siswa, karena pada dasarnya Sekolah Gajah Wong adalah Sekolah yang bebas biaya.

Menurut hemat penulis, Sekolah Gajah Wong adalah sekolah nonformal dengan pendidikan berbentuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa ciri pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah, pengganti, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung Pendidikan Sepanjang Hidup (PSH), indikator lain yaitu jangka waktunya yang pendek atau terbatas walaupun programnya terstruktur dan sistem penyampaianya fleksibel lebih berpusat pada peserta, kurikulum yang disusun secara tersendiri yang berbasis pada lingkungan masyarakat

dan pengawasannya dilakukan secara demokratis atau *self-governing*.<sup>15</sup>

Sekolah Gajah Wong dalam keabsahannya terkendala perijinan untuk mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas pendiri. Sertifikat atau ijazah maupun rapor yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, tetap diakui untuk dapat mendaftar ke jenjang Sekolah Dasar atau Taman Kanak-Kanak karena pada dasarnya setiap Sekolah Dasar harus mau menerima setiap anak tanpa terkecuali.

Penulis sependapat dengan Drs. Bakhtiar Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan DISDIKPORA yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kebijakan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hal itu bisa diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, tidak terdapat kebijakan yang mengatur tentang siswa dari keluarga kurang mampu dalam penyelenggaraan pendidikan, bagaimana mereka mengikuti jenjang pendidikan sejak usia dini, hingga tingkat menengah. Perda ini belum menggariskan kebijakan tentang pemerataan, akses dan biaya yang terjangkau bagi golongan miskin.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 3 ayat (3) sub a bahwa tugas pemerintah menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan

---

<sup>15</sup> Menurut "The Motivation of educational institutions for validation of non-formal and informal learning" oleh Doris Gomezelj Omerzel, 2010, Juni 2010, Vol. 8 Issue 2, hlm 71 - 88.

meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.<sup>16</sup> Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf i bahwa tanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial. Hal itu berarti bahwa pemerintah seharusnya memberikan kebijakan ataupun bantuan untuk meningkatkan dan menjamin terlaksananya kesejahteraan warga negara. Berbeda dengan fakta yang terjadi di Komunitas Ledhok Timoho sebagaimana yang dikatakan oleh Faiz Fakhruddin, selaku pengurus Sekolah Gajah Wong, beliau mengungkapkan bahwa warga tidak dapat mendapatkan berbagai akses program dari

pemerintah dikarenakan tidak adanya kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertib administrasi pemerintahan dan birokrasi yang berbelit dan menyusahkan warga untuk mengurusnya. Masyarakat Komunitas Ledhok Timoho tidak pernah mendapatkan bantuan maupun santunan dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka menganggap bahwa pemerintah mengabaikan keberadaan mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak anak atas pendidikan dilaksanakan di Sekolah Gajah Wong karena adanya kesadaran para orangtua anak warga komunitas Ledhok Timoho yang mulai mengerti pentingnya pendidikan sebagai bagian dari hak anak yang wajib dipenuhi. Sekolah Gajah Wong merupakan sekolah nonformal dengan pendidikan berbentuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak), walaupun bermotto “Sekolah untuk rakyat miskin” namun pelaksanaannya tidak seratus persen gratis yaitu terkendala pada biaya operasional

---

<sup>16</sup>Endang, Sumiarni dan Chandera, Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 4.

sekolah. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan yaitu keabsahan perijinan pendirian sekolah, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai untuk proses belajar dan mengajar serta belum adanya pengajar yang tersertifikasi sebagai guru yang berdampak pada kualitas pendidikan.

## 5. REFERENSI

### Buku

Abdi, Supriyanto, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

Aviandari, Distia, dkk, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka (SAMIN), Yogyakarta.

Basuki, Zulf Djoko, 2005, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Cetakan I, Yarsif Watampone, Jakarta.

Brownlie, Ian, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia (Edisi Kedua)*, Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta.

Damanik, Jayadi, et. al, 2005, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan (Cet. Ke. 1)*, Komnas HAM, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

(Edisi Keempat) , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dini Singgi, Arinta Dea, et.al, 2016, *Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait HIV Berdasarkan Standar Internasional Hak Asasi Manusia*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta.

Endang, Sumiarni dan Chandera, Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ihsan Fuad, 2005, *Dasar-dasar Kependidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Joni, Muhammad, dan Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Nowak, M., *Un Covenant on Civil and Political Right, CCPR Comentary*, Engel, Kehl, 1993.

Setiadi, 2008, *Konsep & keperawatan keluarga*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Srimarga, Ilham Cendekia, dkk, 2011, *Laporan Alternatif Hak EKOSOB : Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta.

Strarke, *Introduction to International Law*. 9<sup>th</sup> ed. 1984, Butterworths, London.

Sumarsono, S, 2001, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tirtarahardja, U, La Sulo, S.L, 2005, *Pengantar Pendidikan*. (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Van Bueren, Geraldine, 1998, *International Document on Children*, (2<sup>nd</sup>, eds).

### Surat Kabar

Koran Tempo, 20 Febuari 2008

### Jurnal

Ahsri, Muhammad, 2008, *Gugatan Warga dan Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 5, Nomor. 2, Januari 2008,

Jaka Triyana, Heribertus, 2006, *Komentar Hukum Mengenai Putusan*

*Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 Tentang APBN Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum UGM.

Jaka Triyana, Heribertus, dan Aminoto, 2009, *Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB Oleh Pemerintah Provinsi DIY*, Mimbar Hukum, Vol. 21, Nomor. 3, Oktober 2009.

Lukman Hakim, 2016, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Edutech, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016.

Nalle Williamson, Victor Immanuel. 2011. *Mengembalikan Tanggungjawab Negara Dalam Pendidikan : Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas dan UU BHP*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 4, Agustus 2011.

Pribadi, Deny Slamet, 2007, *Kajian Hak Asasi Manusia Untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 3, No. 1, Juni 2007.

Purwanto, Harry, 2000, *Legislasi nasional Dibidang HAM*, Naskah Diskusi Terbatas Penyusunan Manual Ham Indonesia, FH-Deplu RI

*UN Center for Human Rights* dan Komnas HAM, Lembar Fakta (*Fact Sheet*), Naskah Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak 1989 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights

The Limburg Principles on The Implementation Of The International Covenant On Economic Social and Cultural Rights